

**COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENYELESAIAN MASALAH SAMPAH
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

MUHAMMAD REZKY SEPTIO PUTRA
NPP. 30.0565

*Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si
Email: rezkyseptio24@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem, namely the people of Bekasi City still litter which causes accumulation of waste in the final disposal site (TPA), there is still a lack of facilities and infrastructure in waste management, there are still illegal landfills (TPS). This requires collaboration involving various private parties and the government in solving waste problems in Bekasi City, West Java Province. **Purpose:** This research aims to find out and analyze collaborative governance in solving waste problems in the city of Bekasi, to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of collaborative governance in solving waste problems in the city of Bekasi, to find out and analyze efforts to overcome the inhibiting factors collaborative governance in waste settlement in Bekasi City, West Java Province. **Methods:** The research method used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** Obstacles that occur in the collaboration carried out to overcome waste problems in Bekasi City, West Java Province are supporting facilities and infrastructure such as lack of transportation in waste transportation, lack of personnel and budget availability for implementing personnel in the field which has an impact on the lack of resilience of personnel in handling waste because there is no material support for these personnel. The theory used as an analytical tool in writing this thesis is collaborative governance theory from Ansell and Gash which explains that collaborative governance is seen in 4 aspects, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership.), and collaborative process (collaboration process). **Conclusion:** Based on the results of field research that Collaborative Governance in Solving Waste Problems in Bekasi City has been going well, but in the process there are still obstacles, namely the lack of budget and facilities and infrastructure and the government has also made efforts to overcome these obstacles quite well. **Keywords:** Collaboration, Waste Management, Stakeholder

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yaitu masyarakat Kota Bekasi masih membuang sampah sembarangan yang membuat penumpukan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA), masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, masih terdapat adanya tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak swasta dengan pemerintahan dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. **Tujuan :** Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam penyelesaian masalah sampah di kota Bekasi, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat collaborative governance dalam penyelesaian masalah sampah di kota Bekasi, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor penghambat collaborative governance dalam penyelesaian sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hambatan yang terjadi dalam kolaborasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah fasilitas sarana dan prasarana penunjang seperti kurangnya transportasi dalam pengangkutan sampah , kurangnya personal dan ketersediaan anggaran bagi personil pelaksana di lapangan yang berdampak pada kurang tanggungnya personil dalam penanganan sampah karena tidak adanya dukungan secara material bagi personil tersebut. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash yang menjelaskan bahwa dalam collaborative governance dilihat pada 4 aspek yaitu starting condition (kondisi awal), institusional design (desain institusional), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), dan collaborative process (proses kolaborasi). **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui hambatan yaitu kurangnya anggaran dan sarana dan prasarana dan pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cukup baik.

Kata kunci: Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Pemangku Kepentingan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari limbah atau sampah sebagai sebuah hasil buangan dari proses aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disamping perkembangan fisik, pesatnya perkembangan penduduk akan membawa konsekuensi timbulnya permasalahan sampah. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, hal tersebut akan menghasilkan debit volume sampah yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk terutama di daerah kota juga semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pusat konsentrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur di perkotaan yang salah satunya adalah masalah sampah yang merupakan hasil buangan yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Permasalahan pada sampah merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Data yang dilaporkan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020 memperlihatkan keseluruhan produksi sampah domestik yang telah mencapai 67,8 juta ton. Data tersebut menyatakan bahwa setiap harinya menghasilkan sampah sebesar 185,753 ton atau dari jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa. Yang mana jika dikalkulasikan setiap penduduk

menghasilkan 0,68 kilogram per hari. Dalam hal ini pengelolaan permasalahan sampah yang terjadi harus ditangani oleh banyak pihak maka dari itu perlu ada nya kolaborasi dalam penyelesaiannya. Collaborative Governance merupakan respon dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang bersifat kompleks dibalik keterbatasan sumber daya dan efisiensi anggaran. Collaborative Governance dianggap sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan masalah sosial yang kronis, merumuskan rencana pembangunan daerah untuk kebijakan perlindungan lingkungan melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada pengelolaan sampah yang terlaksana di kota bekasi masih sangat jauh dari target yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, dimana dalam sehari ada sebanyak 800 ton sampah yang tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang dari total 1.800 ton sampah yang dihasilkan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh angka 46% presentase sampah yang dapat ditangani menggambarkan bahwasannya pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada setiap Kecamatan yang berada di Kota Bekasi belum terlaksana dengan maksimal dan masih diluar dari yang diharapkan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan perhari nya dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada. Seiring berjalannya waktu Penduduk selalu bertambah maka dari itu sampah yang dihasilkan pastinya sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang ada. Timbulan sampah yang ditimbun pada setiap tempat pembuangan akhir yang sudah ada tentu saja seiring berjalannya waktu akan terjadi overload. Pengelolaan sampah yang diberlakukan di tempat pembuangan akhir Kota Bekasi TPA Sumur Batu menggunakan sistem Sanitary Landfill. Penanganan sampah di pusat perkotaan dengan luas daerah Kota Bekasi 210,5 km² dengan berisikan jumlah penduduk yang bertempat sebanyak 2,54 juta jiwa yang mana jika dibandingkan dengan tenaga kerja kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang hanya berjumlah 1.600 orang personil tentu ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang angkanya mencapai jutaan jiwa. Berkaitan dengan keberadaan jumlah sampah di Kota Bekasi yang sangat menumpuk. Berdasarkan realisasi indikator kinerja dan realisasi anggaran, terinformasikan bahwa belum semua target kinerja tercapai. Target kinerja yang belum tercapai tersebut adalah pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan collaborative governance sebagai referensi atau perbandingan untuk dijadikan sebagai acuan. Penelitian dari Ely Sulfianti (2011) melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep dan praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah adapun metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan. Penerapan konsep kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga tidak mustahil diterapkan. Keterlibatan pemangku kepentingan diikat dalam proses kolaborasi dengan keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan perencanaan dalam melihat karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada. Persamaan penelitian ini adalah memakai teori Ansel dan Gash sebagai acuan dalam perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, namun perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penulis pada penelitiannya menerapkan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ely Sulfianti hanya bersifat perencanaan dan belum mengidentifikasi di daerah. Penelitian dari Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2019) melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Sampah Secara

Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai proses tata kelola kolaborasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan sampah antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan adapun pendekatan penelitian yang dipakai dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah telah terjadi proses kolaborasi. Kolaborasi terbentuk karena adanya kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama terhadap pengelolaan sampah serta didukung dengan terlihatnya keberhasilan yang telah dirasakan pemangku kepentingan. Kolaborasi terjalin dengan kendala yaitu masyarakat yang belum terbiasa dalam memilah sampah namun adanya dialog untuk mencari solusi dalam penyelesaiannya. Persamaan penelitian ini adalah memakai teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis adapun perbedaannya adalah lokus penelitian di Kota Bekasi dan penelitian yang dilakukan berusaha mengidentifikasi kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang bisa terlibat dalam pengelolaan sampah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Menurut Fernandes Simangunsong (2017:231), data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Walikota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Asisten

Daerah II Kota Bekasi, Kepala Bappeda Kota Bekasi, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Bekasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala Bidang Pengurangan Sampah, Kepala Bidang Penanganan Sampah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya Satpol PP Kota Bekasi, Camat Bantargebang, Pengelola Waste4change, dan Tokoh-Tokoh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat menggunakan teori dari Ansel dan Gash dalam Islamy. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur collaborative governance yaitu starting condition (kondisi awal), institusional design (desain institusional), facilitative leadership (kepemimpinan fasilitatif), collaborative process (proses kolaborasi). Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Starting Condition (kondisi awal)

Kondisi awal merupakan dimana suatu kondisi Situasi awal antara pemangku kepentingan dan antara lembaga berangkat dari kondisi yang berbeda dalam kondisi awal ini. Dalam kondisi awal pada teori ini menjelaskan berupa sumber daya dan pengetahuan, insentif dan konflik yang ada. Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi awal dari pengelolaan sampah di Kota Bekasi menggambarkan bahwa masih terdapat kurangnya kordinasi antar pihak, kurang optimalnya prosesl pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah masih mengalami kekurangan karna faktor kurangnya armada, dan petugas kebersihan, serta masih banyak titik tempat pembuangan ilegal yang ada.

3.2. Institusional Design (desain institusional)

Desain institusional dengan memperhatikan protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaboratif. Penyelenggaraannya harus bersifat terbuka dan inklusif agar setiap kelompok merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Desain institusional yang ada berupa partisipasi forum, aturan, transparansi dan forum terbatas. bahwasannya masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi walaupun memang sudah beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas dengan masyarakat dalam mengelolanya, akan tetapi sudah adanya forum terbatas yang ada mulai dari sektor masyarakat maupun pihak swasta yang menjadi forum terbatas dalam dari pengelolaan sampah pada Kota Bekasi.

3.3. Facilitative Leadership (kepemimpinan fasilitatif)

Aspek kepemimpinan merupakan merupakan unsur penting dalam mengantar pemangku kepentingan yang berkolaborasi kedalam perundingan dan negosiasi untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menyatukan mereka dalam semangat kolaboratif. Pada sub tema ini menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang ada di Kota Bekasi dalam menyelesaikan masalah sampah sudah paham dan saling menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan kepada tiap pemangku kepentingan. Diantara lain memiliki sifat pemahaman memahami konteks, memiliki kompetensi Teknis rasional dan memiliki karakteristik pribadi yang baik.

3.4. Collaborative Process (proses kolaborasi).

Proses kolaborasi merupakan inti dari model kolaborasi. Proses kolaborasi digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan. Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan bersama yang

disepakati. Kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dari hasil pengamatan menjelaskan sudah ada dialog tatap muka yang dilakukan terhadap Dinas Lingkungan dengan Pihak Swasta dan sering menjalani kolaborasi dalam bentuk penerapan pengelolaan sampah daur ulang terhadap pengelolaan sampah di Kota Bekasi dan dalam pelaksanaan kolaborasi masing-masing dari pemegang kepentingan antara dinas dan pihak swasta telah membangun kepercayaan dan harapannya dapat berjalan lebih baik dalam hal membangun suatu hubungan. Begitujuga dengan para pemangku kepentingan sudah paham akan pemahaman dalam menjalani suatu kolaborasi dibutuhkan kepedulian bersama guna terwujudnya suatu tujuan bersama. pelaksanaan pada hasil sementara sudah ada walaupun belum jangkauan besar akan tetapi dalam setiap pelaksanaan pasti akan menjadi evaluasi yang menjadikan hasil dari berikutnya lebih baik dan harapannya warga dapat partisipasi dalam penanganan jika ada sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki URC supaya penanganannya dapat cepat dan tepat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan tepat sasaran dan masih belum sesuai dengan pelaksanaan kolaborasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal yang diharapkan. Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Bersama dengan pihak swasta dan perangkat daerah serta beberapa kelompok swadaya masyarakat yang terkait sebenarnya belum dikatakan dengan baik dan sempurna, upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melakukan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah yang adaditentu tidak akan lepas dari sedikit banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu seperti penerapan dalam pengelolaan sampah yang belum optimal dalam penanganan sampah yang belum mencapai tujuan, yaitu berkurangnya volume sampah. Kurangnya personal pegawai maupun tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, masih banyaknya rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang mengakibatkan kurang pedulinya masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya sarana transportasi yang digunakan dalam pengelolaan sampah yang mengakibatkan penumpukan terjadi pada tempat pembuangan sampah diberbagai titik sehingga tidak terkelola dengan baik serta realisasi anggaran yang belum efisien dalam program pengelolaan persampahan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sudah ada dan sudah berjalan namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kurangnya koordinasi antar pihak, kurang optimalnya proses pengelolaan sampah khususnya pengangkutan sampah masih mengalami kekurangan karena faktor kurangnya armada, dan petugas kebersihan, serta masih banyak titik tempat pembuangan ilegal yang ada. Masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bekasi walaupun memang sudah beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas dengan masyarakat dalam mengelolanya. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses collaborative berasal dari internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah lebih mengoptimalkan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan persampahan agar berjalan dengan efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai metode studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ansel dan Gash dalam Islamy.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Masalah Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Nursapia. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Islamiy, L.O.S. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Deepublish.
- Josep. 2018. Perbandingan Tata Pemerintahan Antara Good Governance dan Sound Governance. Jakarta Selatan: Indocamp.
- Mindarti, L. I. 2018. Konsep Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Dwiyanto A, 2004 Rorientasi ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar pada FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Bandung : Alfabeta
- Astuti, Sunu, Retno., Hardi, Warsono., Abd.Rachim. 2020. Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Islamy, H. La Ode Syaiful. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Baubau: Deepublish
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18(4): 543-571.